

**DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
BEBERAPA PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2022**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Denisa Arta Uli Margaretta Pasaribu  
NPM. 1811021021**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ***ABSTRACT***

### ***DETERMINANTS OF MOTOR VEHICLE TAX REVENUE IN SEVERAL PROVINCES ON THE ISLAND OF SUMATRA IN 2015-2022***

**By**

**DENISA ARTA ULI MARGARETTA PASARIBU**

This study aims to determine the effect of the number of motorized vehicles, the number of working population, and CPI on motor vehicle tax revenue on the island of Sumatra. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) website. This study uses multiple linear analysis methods to determine the effect of the variable number of motorized vehicles, the number of working population, and CPI on motor vehicle tax revenue. The results of this study indicate that the variable number of motorized vehicles has a positive and significant effect on motor vehicle tax revenue on the island of Sumatra. The working population variable has a negative and insignificant effect on motor vehicle tax revenue on the island of Sumatra. Meanwhile, the CPI variable has a positive and insignificant effect on motor vehicle tax revenue on the island of Sumatra.

***Keywords: Motor Vehicle Tax Revenue, Number of Motor Vehicles, Number of Working Population, and CPI***

## **ABSTRAK**

### **DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BEBERAPA PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2022**

**Oleh**

**DENISA ARTA ULI MARGARETTA PASARIBU**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan IHK terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistika (BPS). Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan IHK terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. Variabel jumlah penduduk bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor beberapa Provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan, variabel IHK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor beberapa Provinsi di Pulau Sumatera.

**Kata Kunci: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk Bekerja, dan IHK**

**DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
BEBERAPA PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2022**

**Oleh**

**Denisa Arta Uli Margaretta Pasaribu**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

: **DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR BEBERAPA  
PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015  
2022**

Nama Mahasiswa

: **Denisa Arta Uli Margaretta Pasaribu**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1811021021**

Jurusan

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si**  
NIP 196606211990031003

**MENGETAHUI**

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

**Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M.**  
NIP 198007052006042002

## MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

Penguji I

: Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.

Penguji II

: Arif Darmawan, S.E., M.A.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Maret 2025

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Denisa Arta Uli Margareta Pasaribu

NPM : 1811021021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Determinan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Beberapa Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2022” adalah hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini baik keseluruhan maupun sebagian tulisan tidak saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat dan simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar lampung, 3 Juni 2025

Penulis,



Denisa Arta Uli Margareta Pasaribu

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04 Agustus 1999, sebagai putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Risdianto Pasaribu dan Ibu Rita br Manullang. Penulis memiliki 2 adik perempuan bernama Mega Maharani Pasaribu dan Rahel Yohana Oktavia Pasaribu.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Xaverius 3 Bandar Lampung pada tahun (2006-2012). Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Xaverius 4 Bandar Lampung (2012- 2015). Lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung (2015-2018).

Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiwa S1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis mengambil konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi yaitu Anggota Himpunan Mahasiwa Ekonomi Pembangunan (Himepa) 2018-2020.

Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putra Daerah Univesitsa Lampung Periode I, di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

## **MOTTO**

"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."

**-Amsal 3:5-6**

"Seorang doktor bahkan professor tidak pantas menyandang gelar tersebut apabila mereka tidak mau dan atau tidak bisa dikritik juga mengakui kesalahan.."

**-(Alm.) Prof. Dr. Sahala Panjaitan**

*"Tetaplah tangguh, karena ada asa yang harus jadi nyata. Jangan mengkerdikan dirimu sendiri."*

**-Hotbin Manihuruk**

"Orang-orang yang kita sayangi memang penting, tapi sebelum itu, aku harus percaya diriku sendiri sebelum mereka mempercayai aku."

**- Uzumaki Naruto, (Naruto Shippuden episode 245)**

"Jangan mengecilkan usahamu sendiri."

**- Yusril Izha Mahendra**

"Yang berat bukan kelulusan, tapi bagaimana kamu bertanggungjawab atas gelar yang kamu dapat."

**-Denisa Arta Uli Margaretta Pasaribu**

## **PERSEMBAHAN**

*Puji Tuhan, dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan penyertaanNya.. Dengan kerendahan hati, ku persembahkan Karya Tulis ini kepada:*

*Kedua Orang Tuaku Tersayang*

***Risdianto Pasaribu***

***Rita br Manullang***

*Terimakasih kepada Bapak & Mama yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi untuk diriku hingga saat ini. Berkat Bapak & Mama semuanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, nasihat, cinta dan kasih sayang, serta doa yang kalian panjatkan tak pernah henti kalian berikan kepadaku hingga menjadi kekuatanku dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup.*

***Untuk Adik ku, Mega Maharani, S. Km., Rahel Yohana***

*Terimakasih atas semua doa serta dukungannya selama ini, terimakasih juga telah menjadi motivasi dan pengingatku selama hidup.*

*Serta*

***Almamater tercinta***

***Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung***

*Semoga karya ini bermanfaat*

## SANWANCANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Determinan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Beberapa Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2022.” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis masih sangat terbatas. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun dengan adanya bimbingan, dukungan serta saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan pembimbing utama.
2. Ibu Arivina Ratih S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Amalia, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A., selaku dosen pembimbing kedua atas kesediaan waktu memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

5. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku dosen penguji yang senantiasa memberi pengarahan, kritik dan saran, serta dukungan dan bantuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas seminar proposal dan seminar hasil yang telah memberikan tanggapan, kritikan dan juga sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas seminar hasil yang telah memberikan tanggapan, kritikan dan juga sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Kiyay Satpam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terima kasih selama perjuangan penulis mengurus berkas dan harus bolak-balik, menghibur penulis dan menyemangati walau hanya melalui sedikit canda dan sapaan. Namun, itu sangat berarti bagi penulis dalam mengurangi kepenatan.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Risdianto Pasaribu dan Ibu Rita br Manullang yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang terbaik kepada penulis. Terima kasih selalu mengusahakan memberikan pendidikan terbaik untuk penulis walau beliau tidak merasakan pendidikan samapai di bangkai perkuliahan.
12. Adikku tercinta, Mega Maharani dan Rahel Yohana, terima kasih untuk semua doa serta dukungannya selama ini.
13. Bapak Pdt. Yakob S. Jawar, S.Th., dan Ibu Ruht Damaiyana gembala GPIN Filipi, bapak tua dan mamatua Marsel. Terima kasih sudah menjadi orang tua kedua ku yang selalu memberikan tempat aman, tak berhenti mendoakan, serta terus mendukung setiap hal yang diperjuangkan penulis bahkan disaat penulis berada dititik terendahnya.

14. Hotbin Manihuruk. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, tak henti-hentinya menemani, menyemangati penulis bahkan disaat penulis merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan hidupnya. Terima kasih atas segala doa, semangat, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat ku, Priska Diana Santri, S.E., yang sudah seperti saudara kandung ku dan Yusril Izha Mahendra, S.E., terima kasih atas semua kebaikan, motivasi, doa serta dukungan kalian yang lebih dari keluarga, dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2018 baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman sepelayanan GPIN Filipi, Pemuda/I GPIN Mawil Lampung, seluruh hamba Tuhan di GPIN. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat.
18. Almamater yang kebanggakan, Universitas Lampung.
19. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025

Penulis

Denisa Arta Uli Margaretta Pasaribu

## DAFTAR ISI

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>iv</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                      | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                     | 7          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                   | 8          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                  | 8          |
| <b>II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>               | <b>9</b>   |
| 2.1 Landasan Teori.....                       | 9          |
| 2.1.1 Pajak.....                              | 9          |
| 2.1.2 Teori Kepatuhan.....                    | 14         |
| 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah .....            | 15         |
| 2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor .....          | 17         |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                | 17         |
| 2.3 Kerangka Pemikiran.....                   | 20         |
| 2.4 Hipotesis Penelitian.....                 | 21         |
| <b>III. METODELOGI PENELITIAN .....</b>       | <b>22</b>  |
| 3.1 Subjek dan Objek Penelitian .....         | 22         |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data .....               | 22         |
| 3.3 Definisi Operasional Variabel.....        | 22         |
| 3.4 Metode Analisis Data .....                | 23         |
| <b>IV. PEMBAHASAN .....</b>                   | <b>30</b>  |
| 4.1 Gambaran Objek Penelitian .....           | 30         |
| 4.2 Perkembangan Variabel Penelitian .....    | 30         |
| 4.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor.....           | 30         |
| 4.2.2 Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB).....    | 31         |
| 4.2.3 Jumlah Penduduk Bekerja (JPB) .....     | 32         |
| 4.2.4 Indeks harga konsumen (IHK).....        | 33         |
| 4.3 Analisis Data .....                       | 34         |
| 4.4 Pembahasan Hasil Estimasi Penelitian..... | 43         |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b> | <b>47</b> |
| 5.1 Simpulan .....                | 47        |
| 5.2 Saran.....                    | 48        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>50</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>              | <b>53</b> |

## DAFTAR TABEL

| No Tabel                                                                                               | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Data jumlah kendaraan bermotor di Pulau Sumatera tahun 2015-2022 (dalam ribu unit) .....            | 5       |
| 2. Data jumlah penduduk bekerja di Pulau Sumatera tahun 2015-2021 (dalam ribu jiwa) .....              | 6       |
| 3. Data jumlah indeks harga konsumen di 5 Provinsi Pulau Sumatera tahun 2015-2022 (dalam persen) ..... | 6       |
| 4. Daftar Peneliti Terdahulu .....                                                                     | 18      |
| 5. Definisi Operasional Variabel .....                                                                 | 22      |
| 6. Uji Chow .....                                                                                      | 34      |
| 7. Uji Hausman .....                                                                                   | 35      |
| 8. Uji LM .....                                                                                        | 35      |
| 9. Uji Heteroskedastisitas .....                                                                       | 37      |
| 10. Random Effect Model .....                                                                          | 38      |
| 11. Hasil Uji F .....                                                                                  | 42      |
| 12. Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....                                                         | 42      |

## DAFTAR GAMBAR

| No | Tabel                                                                                                          | Halaman |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2022 .....                         | 4       |
| 2. | Kerangka Pemikiran.....                                                                                        | 20      |
| 3. | Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di 5 Provinsi Sumatera pada tahun 2015-2022 (dalam Juta Rupiah)..... | 31      |
| 4. | Jumlah Kendaraan Bermotor pada 5 (lima) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2022 (Unit) .....                | 32      |
| 5. | Jumlah penduduk bekerja pada 5 (lima) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2022 (Jiwa) .....                  | 33      |
| 6. | Indeks harga konsumen pada 5 (lima) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2022 (persen) .....                  | 34      |
| 7. | Uji Normalitas.....                                                                                            | 36      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sering kali, ketika kita pertama kali mulai mempertimbangkan konsep kemajuan, kita menemukan bahwa kita secara otomatis mengaitkannya dengan modernisasi, industrialisasi, dan bahkan westernisasi. Semua konsep ini didasarkan pada gagasan transformasi. Keempat tahap kemajuan—pembangunan, modernisasi, dan industrialisasi—melibatkan perubahan. Sekalipun keempat hal ini menunjukkan tanda-tanda transformasi, keempatnya pada dasarnya berbeda satu sama lain karena sejarah, prinsip panduan, dan karakteristiknya sendiri, serta gagasan uniknya sendiri tentang apa yang merupakan kesinambungan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Daerah perkotaan dan pedesaan sama-sama mengalami pembangunan yang pesat di Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif merupakan inti dari pembangunan. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk membantu daerah memanfaatkan sumber daya bersama mereka secara maksimal sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka dan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi penduduk setempat.

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan yang mengagumkan, tetapi akan sulit untuk dicapai di Indonesia karena jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, itu tidak akan cukup untuk membangun negara sebesar itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang disengaja dan terarah (Gilarso, 2004). Cara lain untuk melihat pembangunan nasional adalah sebagai perubahan yang disengaja dalam ekonomi, masyarakat, dan budaya yang didorong oleh kebijakan dan strategi ke arah yang dipilih (Deddy T. Tikson, 2005). Misalnya, ketika ekonomi mengalami transisi struktural, produksi sektor industri dan jasa tetap sama atau berkembang dengan lebih cepat, yang mengarah pada

kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Namun, ketika industrialisasi dan modernisasi menyebar ke seluruh ekonomi, kontribusi sektor pertanian akan menyusut dan meningkat pada tingkat yang lebih lambat.

Mendistribusikan kesejahteraan dalam bentuk akses yang adil terhadap sumber daya sosial ekonomi termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan keterlibatan politik adalah salah satu cara untuk mengamati transformasi sosial. Bersamaan dengan itu, perubahan dalam standar dan nilai sosial, seperti transisi dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme, dan pertumbuhan etos dan nasionalisme sering dikaitkan dengan revolusi budaya. Perubahan dari lembaga yang sangat dihormati menjadi organisasi rasional kontemporer, dan dari fokus pada prestasi akademik menjadi fokus pada penguasaan materi. Oleh karena itu, pembangunan terjadi dalam kehidupan masyarakat pada semua skala, dari makro (nasional) hingga mikro (komunitas/kelompok): secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan sangat penting karena memungkinkan pertumbuhan, keragaman, dan kemajuan.

Dana diperlukan untuk mendukung semua pertumbuhan di tingkat nasional dan regional untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat yang berkembang. Pajak menyediakan satu aliran pendapatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. Menurut Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa menerima imbalan secara langsung. Kontribusi tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kemakmuran negara.

Salah satu fungsi terpenting suatu negara adalah perpajakan. Pasalnya, semua pengeluaran, termasuk yang di sektor pembangunan, sebagian didanai oleh pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara. Reformasi sistem perpajakan, termasuk penyesuaian struktur pungutan federal dan daerah, dipengaruhi oleh penerapan otonomi daerah tahun 1999.

Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota merupakan dua komponen utama pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor, transfer, bensin, air permukaan, dan rokok

merupakan bagian dari sistem pajak provinsi. Namun, ada berbagai pajak kabupaten dan kota, seperti pajak periklanan, hotel, hiburan, restoran, parkir, dan lain-lain. (Resolusi No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Gaji). Karena setiap daerah otonom (di sini berarti provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia) memiliki sumber daya yang unik, semua pajak harus digunakan untuk mendanai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak merupakan sarana yang digunakan negara untuk membiayai program pembangunan pusat dan daerahnya.

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan sekunder menjadi pusat perhatian, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperkirakan akan mengalami peningkatan. Setiap orang yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sebaliknya, terdapat eksternalitas negatif yang terkait dengan kepemilikan mobil, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi lingkungan akan terpengaruh oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya. Emisi gas rumah kaca dan polusi udara di kota-kota disebabkan oleh industri transportasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2016), terdapat korelasi yang kuat antara tingginya tingkat polusi udara yang disebabkan oleh lalu lintas dengan meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, dan kematian.

Hampir 90% polutan udara perkotaan dan sekitar 12% dari total emisi karbon dioksida di Indonesia berasal dari transportasi jalan raya (Yudha, 2017). Mobil tidak hanya berkontribusi terhadap pemanasan global dan polusi udara lokal lainnya, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, kebisingan yang berlebihan, dan kecelakaan.

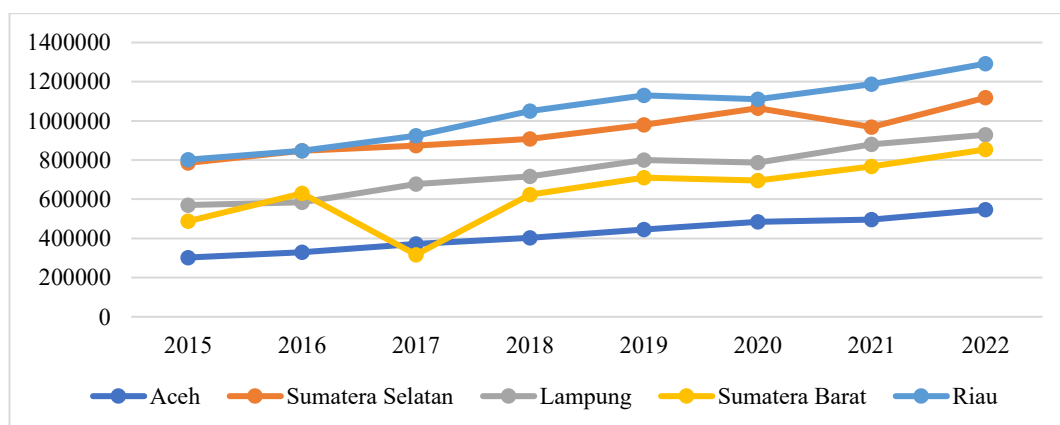
Menyelesaikan masalah akibat yang tidak diinginkan akibat peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah mengatur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Ketika pencemar lingkungan dipaksa membayar atas tindakannya yang merusak lingkungan, teknik PKB ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengganti biaya sosial yang disebabkan oleh eksternalitas negatif.

Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Pajak kendaraan bermotor, sebagai pajak daerah, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kas daerah dan membantu mendukung pemerintahan daerah. Berikut ini adalah beberapa cara daerah memperoleh manfaat dari pajak kendaraan bermotor:

- Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
- Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- Membantu peningkatan pendapatan kabupaten/kota.
- Meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk bekerja terpadat kedua setelah Pulau Jawa dengan wilayah terbesar ketiga setelah Pulau Papua dan Kalimantan. Pulau Sumatera menjadi kontributor perekonomian nasional terbesar ke dua setelah Pulau Jawa. Meski demikian ternyata Pulau Sumatera masih mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA)

Pada Pulau Sumatera terdapat 10 provinsi, diantaranya ada 5 provinsi yang berpotensi besar dalam menyokong pembangunan terutama dalam penerimaan pajak. Kelima provinsi tersebut yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Riau.



Gambar 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2022

Akibat jumlah penduduk bekerja yang besar, maka akan mempengaruhi permintaan penduduk, khususnya pada permintaan jumlah kendaraan bermotor baik beroda dua maupun empat. Yang dimana jumlah kendaraan bermotor mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan bermotor.

Tabel 1. Data jumlah kendaraan bermotor di Pulau Sumatera tahun 2015-2022  
(dalam ribu unit)

| Provinsi         | Tahun |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Aceh             | 1.678 | 1.800 | 1.908 | 2.034 | 2.157 | 2.205 | 2.324 | 2.445 |
| Sumatera barat   | 1.908 | 2.021 | 2.143 | 2.267 | 2.374 | 2.421 | 2.540 | 2.666 |
| Sumatera selatan | 2.989 | 3.114 | 3.290 | 3.476 | 3.631 | 3.691 | 3.851 | 4.021 |
| Lampung          | 3.053 | 3.191 | 3.328 | 3.483 | 3.632 | 3.679 | 3.807 | 3.924 |
| Riau             | 2.939 | 3.097 | 3.295 | 3.519 | 3.707 | 3.784 | 3.993 | 4.216 |

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2015-2022 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2022 jumlah keseluruhan kendaraan bermotor mencapai 119.620.177 juta unit. Dengan demikian, maka adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di tengah masyarakat akan memberikan dampak dan peluang bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Radiktya Nur Prawita (2018) yang menyatakan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah penduduk bekerja, karena pajak bersifat wajib bagi seseorang yang sudah bekerja, maka nantinya semakin besar jumlah penduduk bekerja dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Data jumlah penduduk bekerja di Pulau Sumatera tahun 2015-2021  
(dalam ribu jiwa)

| Provinsi         | Tahun |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Aceh             | 2.182 | 2.087 | 2.138 | 2.243 | 2.256 | 2.359 | 2.361 | 2.394 |
| Sumatera Barat   | 2.184 | 2.347 | 2.344 | 2.480 | 2.540 | 2.581 | 2.581 | 2.688 |
| Sumatera Selatan | 3.695 | 3.894 | 3.942 | 4.012 | 3.968 | 4.091 | 4.179 | 4.289 |
| Lampung          | 3.635 | 3.931 | 3.896 | 4.060 | 4.077 | 4.280 | 4.284 | 4.387 |
| Riau             | 2.554 | 2.765 | 2.781 | 2.915 | 2.996 | 3.022 | 3.148 | 3.168 |

*Sumber:* BPS, 2024

Berdasarkan di atas dapat kita lihat jumlah penduduk bekerja di 5 Provinsi ini mengalami peningkatan disetiap tahunnya, jumlah penduduk bekerja yang meningkat akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Said Habibie yang menyatakan bahwa jumlah penduduk bekerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah indeks harga konsumen.

Tabel 3. Data jumlah indeks harga konsumen di 5 Provinsi Pulau Sumatera tahun 2015-2022 (dalam persen)

| Provinsi         | Tahun |       |       |       |       |       |       |        |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
| Aceh             | 103.3 | 103.3 | 103.4 | 103.4 | 103.5 | 107.1 | 106.5 | 115.3  |
| Sumatera Barat   | 91.3  | 89.8  | 92.3  | 100.4 | 102.2 | 104.2 | 106.8 | 117.7  |
| Sumatera Selatan | 89.08 | 100.8 | 104   | 100.2 | 102.2 | 103   | 105.5 | 110.6  |
| Lampung          | 91.5  | 94.0  | 96.2  | 99.5  | 102.5 | 104.2 | 108.6 | 114.6  |
| Riau             | 90.4  | 97.3  | 100.3 | 100.4 | 102.8 | 103.9 | 106.7 | 114.05 |

*Sumber:* BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Harga Konsumen 5 Provinsi di Sumatera memiliki nilai yang fluktuatif di setiap tahunnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) menggambarkan tentang pola konsumsi masyarakat serta dapat menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa (BPS, 2024). Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terkendali menyebabkan harga-harga barang dan jasa dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat cenderung terjaga, Sedangkan, tak terkendalinya Indeks harga

konsumen dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang dimana kendaraan bermotor juga termasuk didalamnya, Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karena dengan menurunnya permintaan jumlah kendaraan bermotor akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Selamat Bamim (2002) dengan judul berjudul Analisis Faktor-aktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan periode tahun 1990/1991 sampai dengan 1999/2000 yang menyatakan Indeks Harga Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan. Disisi lain, Muibi dan Sinbo (2013) menyatakan tingkat Indeks harga konsumen memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Determinan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2022.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?
2. Apakah jumlah penduduk bekerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?
3. Apakah indeks harga konsumen berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?
4. Apakah jumlah kendaraan motor, jumlah penduduk bekerja, indeks harga konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengaruh jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera.
2. Untuk menjelaskan pengaruh jumlah penduduk bekerja terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera.
3. Untuk menjelaskan pengaruh indeks harga konsumen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah kendaraan motor, jumlah penduduk bekerja, dan indeks harga konsumen, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi Pulau Sumatera.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Sumatera. Juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas Lampung.
2. Bagi akademisi, penelitian ini sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Sumatera
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan kebijakan pengambilan keputusan terutama dalam upaya peningkatan pajak kendaraan bermotor di Pulau Sumatera.”

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pajak**

##### **Pengertian Pajak**

Tujuan perpajakan adalah untuk mendanai kegiatan negara sehingga warga negaranya dapat menikmati standar hidup setinggi-tingginya, dan merupakan persyaratan hukum bahwa individu atau badan membayar pajak kepada negara tanpa menerima manfaat langsung apa pun sebagai imbalannya.

P.J.A. Andriani menyatakan dalam bukunya tahun 2009 "Waluyo" bahwa perpajakan adalah bentuk kontribusi paksa ke kas negara yang jatuh tempo dan harus dibayarkan sesuai dengan kinerja pengembalian, yang tujuannya adalah untuk mendanai pengeluaran umum yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan di negara tersebut.

Ray M. Anderson mengutip "Tax Administration" karya Sommerfeld dalam karyanya. Pengalihan dana dari sektor swasta ke sektor publik, yang dikenal sebagai perpajakan, tidak muncul dari pelanggaran undang-undang administrasi perpajakan, menurut Herschel M. dan Brock Horace R., yang mengutip Mohammad Zain (2007). Agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam mengatur dirinya sendiri, hukum harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang ditetapkan, dan individu harus melepaskan imbalan langsung dan proporsional.

Siti (2014) menyatakan bahwa negara tidak secara langsung bertanggung jawab untuk menyediakan layanan timbal balik guna menjaga kesejahteraan masyarakat ketika mereka mengenakan pajak; sebaliknya, pajak merupakan kewajiban untuk menyumbangkan sebagian kekayaan suatu negara sebagai respons terhadap peristiwa, keadaan, atau tindakan tertentu; lebih jauh lagi, pajak tidak dapat dipaksakan dan tidak dihukum atau dikenakan sanksi.

### **Teori Pajak**

Penyediaan barang-barang publik biasa dilakukan oleh pemerintah barang-barang publik yang disediakan dan dilakukan oleh pemerintah yakni seperti jalan raya, pertahanan nasional dan lain-lain. Sedangkan barang swasta juga dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Seperti kereta api, jasa penerbangan, dan lain-lain. Barang-barang swasta tersebut bukan semata-mata murni hasil dari pihak swasta, melainkan pihak pemerintah juga turut andil dalam pembiayaan atau anggaran pembuatannya. Pihak swasta hanya menjadi pekerja dalam segala proyek pembuatan barang-barang tersebut.

Teori Pigou membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai dengan pajak yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pigou, barang publik harus disediakan didalam suatu tempat dimana kepuasan marginal masyarakat akan publik sama besarnya dengan ketidakpuasan marginalnya akan pajak yang dipungut dari mereka untuk membiayai program-program pemerintah akan barang publik. Artinya semakin banyak anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi barang publik, maka tingkat kepuasan marginal akan semakin menurun, dengan kata lain akan menimbulkan marginal disutility, karena pastinya pemerintah menarik pajak kepada mereka demi membangun barang tersebut. Sedangkan kita tahu bahwa pajak adalah hal yang paling tidak disukai masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk memperkecil anggaran untuk membangun barang-barang publik sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Namun adapun kelemahan analisa dari Pigou didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal.

Arti pajak dan barang publik telah dijelaskan secara singkat diatas, sebagaimana kita ketahui bahwa manakala jumlah penerimaan pajak meningkat, maka pendapatan suatu negara atau daerah akan meningkat, apalagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai, maka pajak merupakan penerimaan daerah yang potensial. Karena Indonesia menganut demokrasi sosialis barang publik merupakan barang yang harus disediakan oleh pemerintah, karena pihak

swasta tidak mau karena tidak mendapat keuntungan dari pembuatan fasilitas umum yang gratis.

Dalam kondisi pendapatan pajak yang relative tinggi, maka secara teoritis untuk membiayai fasilitas umum yang memadai maka pemerintah menggunakan pajak untuk menjadi pembiayaan pembuatan fasilitas publik tersebut, bukan saja karena masyarakat banyak membutuhkan fasilitas yang baik, tapi dari pihak pemerintah juga menginginkan dengan fasilitas yang bagus maka dimungkinkan investor atau wisatawan akan banyak yang mau datang kedaerah kita.

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik).

### **Jenis-jenis Pajak**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

a. Pajak daerah tingkat I atau pajak provinsi, terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan yang digunakan untuk transportasi dikenakan pungutan yang dikenal sebagai pajak kendaraan bermotor. Istilah "kendaraan bermotor" mengacu pada kategori luas yang mencakup kendaraan beroda dan bergandengan yang menempuh berbagai jenis rute darat dan digerakkan oleh berbagai perangkat teknologi, seperti motor listrik atau perangkat lain, yang menyimpan dan mengubah energi. Peralatan yang tidak terpasang secara permanen dan membutuhkan roda dan mesin untuk beroperasi dianggap sebagai peralatan berat. Kendaraan bermotor yang beroperasi di atas air juga termasuk dalam kategori ini.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Biaya pengalihan kendaraan bermotor mencakup pajak, serta biaya yang terkait dengan penjualan, pertukaran, hibah, warisan, dan pembentukan badan usaha, serta biaya yang terkait dengan pengalihan kepemilikan

kendaraan bermotor yang disetujui bersama atau ditindaklanjuti secara sepihak.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pengguna kendaraan bermotor dikenakan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar untuk kendaraan bermotor dapat berupa cairan atau gas.

4) Pajak Air Permukaan

Siapa pun yang mengambil atau menggunakan air permukaan dikenakan pajak air permukaan. Baik di laut maupun di darat, badan air apa pun yang terlihat mengapung di permukaan dianggap sebagai air permukaan.

5) Pajak Rokok

Pemerintah mengenakan pajak rokok kepada mereka yang merokok.

b. Pajak daerah tingkat ii atau pajak kabupaten/kota, terdiri atas :

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. "Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 3) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 4) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- 5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- 7) Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 8) Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 9) Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

## **Fungsi Pajak**

1. Fungsi budgetair (financial), memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi regulierend, mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu

## **Asas Pemungutan**

Pajak Asas pemungutan pajak didasarkan pada tiga asas yaitu:

1. Asas domisili /Asas Tempat Tinggal (Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri).
2. Asas Sumber (Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak)
3. Asas Kebangsaan (Penaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara).

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Menurut Taylor (2006), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat mendorong seseorang khususnya wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu wajib pajak untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran. Dalam kaitannya dengan kepatuhan tersebut, maka kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hidayatulloh, 2013).

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, selanjutnya tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak, Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar perpajakannya.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi PAD akan lebih dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam pembangunan daerah.

Menurut Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar sistem pemerintahan daerah.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Nurcholis (2007), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-

lain yang sah. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

1) Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2) Hasil Retribusi Daerah

Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

#### 2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama dengan SAMSAT. Kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Daftar Peneliti Terdahulu

| No | Peneliti                       | Judul                                    | Alat Analisis   | Hasil                                                   |
|----|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Dwi Ajeng Kartini Apriliyanti, | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi | <b>Variabel</b> | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan |

| No | Peneliti                              | Judul                                                                                                   | Alat Analisis                                                                                                                 | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Harianto, & Dedi Budiman Hakim (2021) | Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan                                      | Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah penduduk bekerja Jumlah Kendaraan Bermotor PDRB Per kapita Indeks harga konsumen Sistem Pajak | memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk bekerja, PDRB per kapita, Indeks harga konsumen dan sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                       |                                                                                                         | <b>Metode</b><br>Analisis Regresi Data Panel                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Said, Habibie (2021)                  | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara | <b>Variabel</b><br>Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah penduduk bekerja Jumlah Kendaraan Bermotor                                 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan target pajak kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dengan diperoleh hasil perhitungan dan ketika dianalisis secara parsial tarif pajak, jumlah penduduk bekerja, dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara. |
|    |                                       |                                                                                                         | <b>Metode</b><br>Analisis Regresi Linier Berganda                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Izzuddin, Danar (2021)                | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di                                  | <b>Variabel</b><br>Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk bekerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

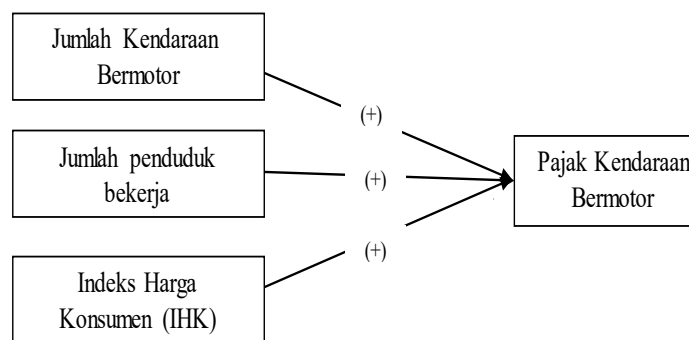
| No | Peneliti                     | Judul                                                                                                               | Alat Analisis                                                                                                                                                                       | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | Kabupaten Malang.                                                                                                   | Jumlah penduduk bekerja<br>Jumlah Kendaraan Bermotor<br>Pendapatan Per Kapita<br><br><b>Metode</b><br>Analisis Regresi Linier Berganda                                              | Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang, begitu juga pada Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang. Sedangkan Pendapatan per kapita berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang.                                                                                                     |
| 4  | Radiktya, Nur Prawita (2018) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016 | <b>Variabel</b><br>Jumlah penduduk bekerja<br>Jumlah Kendaraan Bermotor<br>PDRB per kapita<br>Transportasi PDRB Per Kapita<br><br><b>Metode</b><br>Analisis Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB, PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB, sementara PDRB per kapita berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan PKB. |

| No | Peneliti                                 | Judul                                                                                                                                                               | Alat Analisis                                                                                                                                             | Hasil                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Fiona Febriani<br>BR. Marpaung<br>(2017) | Analisis Faktor-<br>Faktor Yang<br>Mempengaruhi<br>Pendapatan Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Dengan<br>PDRB Sebagai<br>Variabel<br>Moderating Di<br>Sumatera Utara. | <b>Variabel</b><br>Jumlah penduduk<br>bekerja<br>Jumlah kendaraan<br>bermotor<br>Investasi<br>PKB<br><br><b>Metode</b><br>Analisis<br>Regresi<br>Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja, jumlah kendaraan bermotor, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. |

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting dalam faktor penerimaan atau pendapatan bagi sebuah negara. Karena peran daripada penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat besar nilai pendapatannya, sehingga sangat membantu untuk sektor penerimaan pajak. Oleh karena inilah mengapa negara menggunakan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sektor yang bisa membantu tumbuhnya perekonomian dengan cara mengutip pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel independen yang ingin dilihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pulau Sumatera yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan Indeks harga konsumen . Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini

1. Diduga jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.
2. Diduga jumlah penduduk bekerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.
3. Diduga indeks harga konsumen berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.
4. Diduga jumlah kendaraan motor, jumlah penduduk bekerja, indeks harga konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 5 Provinsi pada Pulau Sumatera.

### III. METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan indeks harga konsumen. Daerah penelitian yang digunakan adalah 5 Provinsi yang berada di Pulau Sumatera, yang termasuk ke dalam 5 Provinsi dengan jumlah penduduk bekerja terbesar.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui BPS, juga sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menunjukkan definisi dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator empiris dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

| Variabel                  | Konsep                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator (satuan) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Jumlah Kendaraan Bermotor | Setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. | (Unit)             |
| Jumlah penduduk bekerja   | Sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat                                                                                                                                        | (Jiwa)             |

| Variabel                            | Konsep                                                                                                                                     | Indikator (satuan) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                     | dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk, serta dalam usia produktif dan memiliki pekerjaan.                                            |                    |
| Indeks Harga Konsumen               | Sebuah indikator ekonomi yang mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam periode tertentu. | (Poin)             |
| Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor | Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.                                                                             | (Milyar)           |

### 3.4 Metode Analisis Data

#### 3.4.1 Alat Analisis

Alat analisis digunakan untuk menjawab permasalahan/hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi.

#### 3.4.2 Model Penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor dapat digambarkan dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Ln}(\text{PKB}_{it}) = \text{Ln } \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}(\text{JKB})_{it} + \beta_2 \text{Ln}(\text{JPB}_{it}) + \beta_3 \text{IHK}_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| PKB                       | : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor |
| JKM                       | : Jumlah Kendaraan Bermotor           |
| JPB                       | : Jumlah Penduduk Bekerja             |
| IHK                       | : Indeks Harga Konsumen               |
| i                         | : <i>cross section</i>                |
| t                         | : <i>time series</i>                  |
| $\beta_0$                 | : konstanta                           |
| $\beta_1, \beta_2, \dots$ | : koefisien regresi                   |
| $\mu$                     | : <i>error term</i>                   |

### 3.4.3 Model Analisis

#### 1) Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi nilai residual yang terdistribusi normal merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Jarque-Bera. Jika nilai Jarque-Bera < chi square, dan jika nilai probabilitas >  $\alpha = 5\%$  maka data terdistribusi normal. Berdasarkan hal ini, hipotesis uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0$  = Jika nilai Jarque-Bera < chi square, dan jika nilai probabilitas >  $\alpha = 5\%$  (terdistribusi normal)
- $H_a$  = Jika nilai Jarque-Bera < chi square, dan jika nilai probabilitas >  $\alpha = 5\%$  (tidak terdistribusi normal)

##### b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Widarjono (2018) metode OLS mengasumsikan bahwa variabel gangguan memiliki rata-rata nol atau memiliki varians yang konstan dan variabel gangguan tidak saling berhubungan (homokedastisitas), sehingga menghasilkan estimator OLS yang BLUE. Heteroskedastisitas terjadi apabila dalam persamaan regresi variabel gangguan memiliki varians yang tidak konstan. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model persamaan regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch Pagan. Uji dilakukan dengan membandingkan nilai alpha 0,05 dengan nilai probabilitas variabel bebas. Apabila nilai probabilitas variabel bebas lebih besar dari alpha 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hal ini, hipotesis uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0$  = nilai probabilitas variabel bebas > alpha 0,05 (homokedastisitas)
- $H_a$  = nilai probabilitas variabel bebas > alpha 0,05 (heterokedastisitas)

## 2) Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Widarjono, dalam analisis model data panel, ada 3 pendekatan yang terdiri dari Pendekatan *Common Effect Model*, Pendekatan *Fixed Effect Model*, dan Pendekatan *Random Effect Model* yang digunakan untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, yaitu sebagai berikut:

### a) Pendekatan *Common Effect Models* (CEM) atau *Pooled Least Square* (PLS)

Pendekatan CEM atau PLS hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antarwaktu dan model, sehingga model ini dapat dikatakan sebagai model yang paling sederhana. Dalam pendekatan CEM tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, maka dalam berbagai waktu diasumsikan perilaku data adalah sama. Untuk mengestimasi model data panel ini digunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS).

### b) Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan adanya perbedaan intercept pada setiap subject sedangkan slope tetap sama antar subjek. Untuk membedakan antara satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy. Model ini seringkali disebut dengan model *Least Square Dummy Variables* (LSDV).”

### c) Pendekatan *Random Effect Model* (REM)

Dalam pendekatan *Random Effect Model*, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu individu dan waktu, maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen waktu dan *error* gabungan.

## 3) Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

Sebelum melakukan estimasi regresi data panel, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memilih model yang baik yang dapat digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Tiga teknik tersebut adalah :

a) Uji Likelihood (uji f- Statistik)

Uji ini bertujuan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan model *Common Effect Model* (CEM). Hipotesis dalam uji Likelihood (Uji f-statistik) adalah sebagai berikut :

$H_0$  : *Common Effect Model* (CEM)

$H_a$  : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika dari hasil pengujian didapatkan nilai :

- $P\text{-value} < \alpha (0,05)$  , maka  $H_0$  ditolak. Sehingga, *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih menjadi model terbaik.
- $P\text{-value} > \alpha (0,05)$  , maka  $H_0$  diterima. Sehingga, *Common Effect Model* (CEM) terpilih menjadi model terbaik.

b) Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman yaitu sebagai berikut

$H_0$  : *Random Effect Model* (REM)

$H_a$  : *Fixed Effect Model* (FEM)

Jika dari hasil pengujian didapatkan nilai :

- Cross section random  $> \chi^2$  tabel, maka  $H_0$  ditolak. Sehingga, *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih menjadi model terbaik.
- Cross section random  $< \chi^2$  tabel, maka  $H_0$  diterima. Sehingga, *Random effect model* (REM) terpilih menjadi model yang terbaik.

c) Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect Model* (REM) dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect Model* didasarkan pada nilai residual dari metode *Ordinary Least Square* (OLS). Uji Lagrange Multiplier digunakan apabila dalam

uji Chow model yang terpilih adalah *Common Effect Model*, sedangkan pada uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*. Sehingga uji LM digunakan sebagai uji terakhir untuk menentukan model Common Effect atau Random Effect yang paling tepat untuk digunakan.

Hipotesis dalam uji Lagrange Multiplier (LM) adalah sebagai berikut :

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_a$  : *Random Effect Model*

Jika dari hasil pengujian didapatkan nilai :

- Jika LM statistik  $>$  chi-square tabel, maka  $H_0$  ditolak. Sehingga, *Random Effect Model* (REM) terpilih menjadi model terbaik.
- Jika LM statistik  $<$  chi-square table, maka  $H_0$  diterima . Sehingga, *Common Effect Model* (CEM) terpilih menjadi model terbaik.

#### 4) Pengujian Hipotesis

##### a) Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel-variabel independen dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam uji t adalah sebagai berikut

$H_0$  ;  $\beta_1 = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_a$  ;  $\beta_1 < 0$  (ada pengaruh negatif)

Sehingga dapat dibuat kesimpulan jika menggunakan Uji-t yaitu;

- Nilai t-hitung  $>$  nilai t-tabel, maka  $H_0$  ditolak. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Nilai t-hitung  $<$  nilai t-tabel, maka  $H_0$  diterima. Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- Hipotesis Jumlah Kendaraan Bermotor

Perumusan hipotesis secara statistik menjadi:

$H_0$  :  $\beta_1 = 0$  ( Hipotesis nol menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor )

$H_a : \beta_1 > 0$  ( Hipotesis alternatif menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor )

- Hipotesis Jumlah penduduk bekerja

Perumusan hipotesis secara statistik menjadi :

$H_0 : \beta_1 = 0$  (Hipotesis nol menyatakan bahwa jumlah penduduk bekerja berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor )

$H_a : \beta_1 > 0$  (Hipotesis alternatif menyatakan bahwa jumlah penduduk bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor )

- Hipotesis Indeks harga konsumen

Perumusan hipotesis secara statistik menjadi:

$H_0: \beta_1 = 0$  (Hipotesis nol menyatakan bahwa Indeks harga konsumen berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor)

$H_a: \beta_1 > 0$  (Hipotesis alternatif menyatakan bahwa Indeks harga konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor)

#### b) Uji Kelayakan Model (Uji f)

Uji f dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila f-hitung lebih besar dari nilai f-kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupula sebaliknya, apabila f-hitung lebih kecil dari nilai f-kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam uji f adalah sebagai berikut :

$H_0 ; \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  (tidak ada pengaruh)

$H_a ; \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$  (ada pengaruh)

Sehingga dapat dibuat kesimpulan jika menggunakan Uji f yaitu;

- Nilai  $f\text{-hitung} > \text{nilai } f\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- Nilai  $f\text{-hitung} < \text{nilai } f\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

c) Koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Koefisien determinansi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variabel dependen dapat dijelaskan oleh semua variabel independen. Koefisien Determinansi ( $R^2$ ) nilainya antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin besar nilai koefisien determinasi atau semakin mendekati nilai 1 (satu) maka variabel-variabel independen lebih mampu menjelaskan variabel dependennya.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan di bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera. Hasil uji ini artinya kenaikan jumlah kendaraan bermotor menyebabkan kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang sangat penting karena penerimaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah kendaraan bermotor dengan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor, sejalan dengan jumlah kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 hingga tahun 2022 yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
2. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel jumlah penduduk bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera. Artinya, kenaikan jumlah penduduk bekerja akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera secara drastis. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah penduduk bekerja, belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini disebabkan karena penduduk yang bekerja selaku wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya yaitu membayai pajak kendaraan bermotor.
3. Hasil penelitian variabel *Indeks harga konsumen* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau

Sumatera. Hasil uji ini artinya, dampak indeks harga konsumen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh yang besar. Hal ini dikarenakan walau pajak yang bersifat memaksa tetapi pendapatan masyarakat berkurang akibat kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan konsumsi masyarakat menurun, sehingga indeks harga konsumen ini naik atau turun tidak terlalu berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

4. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan Indeks harga konsumen positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 5 Provinsi di Pulau Sumatera. Artinya, secara bersama sama seluruh variable pada penelitian ini yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk bekerja, dan IHK akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara positif dan signifikan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini jumlah penduduk yang bekerja serta jumlah kendaraan bermotor di 5 Provinsi di Pulau Sumatera tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, diharapkan untuk pemerintah dapat melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan gencarnya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. Kemudian, upaya lain yang perlu dilakukan ialah dengan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem pembayaran pajak yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah memberikan kebijakan terkait pemberian insentif pembebasan denda pajak kendaraan bermotor baik secara online maupun offline. Dan terakhir adalah dengan melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan melakukan razia maupun memberikan surat tilang.
2. Setelah melakukan penelitian ini, dan diperoleh hasil jumlah penduduk bekerja memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah dengan menggiatkan sosialisasi pembayaran

pajak dengan menggunakan E-Samsat baik melalui media sosial, spanduk, maupun media elektronik, hal tersebut perlu dilakukan karena mungkin beberapa wajib pajak belum mengetahui layanan ini. Sehingga penduduk yang bekerja juga dapat melakukan pembayaran pajak melalui jarak jauh dan tidak perlu datang ke kantor Samsat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozak Rizal, dkk. (2016). Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa. Jurnal Pena Ilmiah : Volume 1 No.1. UPI Kampus Sumedang. <http://ejournal.upi.edu/index.php/penailmiah/article/view/3580>.
- Adriani, P.J.A, 2009 waluyo. akuntansi pajak. Jakarta penerbit: Salemba Empat.
- Ajeng Kartini Apriliyanti, D., Harianto, & Budiman Hakim, D. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Institut Pertanian Bogor.
- Akhmad, Geovani Puspa Adila, dkk. 2014. Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Model-Eliciting Activities (MEAs) Pada Materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel di Kelas VII-A SMP Negeri 1 Lamongan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Vol 3 No 2
- Apriliyanti, Dwi A. K., et al (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan. Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Indonesia
- Ariasih dkk. 2011. Pengantar Data Mining. Program Studi Magister Teknik Elektro, Universitas Udayana. Denpasar
- Badan Pusat Statistik (2016). *Statistik Transportasi Darat 2016. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2017). Jumlah penduduk bekerja Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin. *Kependudukan*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2017). *Statistik Transportasi Darat 2017. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2017). *Statistik Transportasi Darat 2017. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2018). *Statistik Transportasi Darat 2018. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2019). *Statistik Transportasi Darat 2019. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2021). *Statistik Transportasi Darat 2021. Publikasi*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.

- Bamim, Selamat. 2002. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi*. Kol 1 no.1 Tahun 2002. Yogyakarta
- Deddy T. Tikson. 2005. Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. <http://ecozone.html>. Diakses pada: Senin, 18 April 2011.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gilarso. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Kanisius. Yogyakarta.
- Gujarati, D.N. and Porter, D.C. (2009) Basic Econometrics. 5th Edition, McGraw Hill Inc., New York.
- Gujarati, N. D. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba
- Habibie, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Hidayatulloh, Hilman Akbar . 2013 . Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Cicadas). Skripsi. Bandung: Jurusan Akuntansi – Universitas Komputer Indonesia.
- Izzuddin, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Malang. STIE MALANGKUCECWARA.
- Koswara, E.2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Talahan dan Menyangkut Kebijakan 1-Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No.1,51-52.Jakarta.
- Marpaung, Febriani Br. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan PDRB PER KAPITA Sebagai Moderating Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Muibi & Sinbo. 2013. Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011). *World Applied Sciences Journal* 28 (1): 27-35.
- Nairobi.2017. Perekonomian Indonesia. ISBN 978-602-6739-82-7.
- Natsir, M. 2014. Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Natsir, M. 2014. Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nur Prawita, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016. Universitas Islam Indonesia.
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Prawita, Radiktya Nur. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia
- Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. dalam M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riyadi & Bratakusumah. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta. Multigrafika.
- Suparmoko. M. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Taylor, S.E. 2006. *Health Psychology*. Singapore: McGraw-Hill Companies.
- Tikson, Deddy T. (2005). *Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*. Makassar: Ininnawa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widarjono, A. 2018. *Ekonometrika. Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Yudha, S. W. (2017). Air pollution and its implications for Indonesia: Challenges and imperatives for change. <http://pubdocs.worldbank.org/en/183201496935944434/200417-AirQualityAsiaAir-Pollution.pdf>
- ZAIN, Mohammad, Mohammad Zain. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007. TEXT.
- Zulfah Dwi Hasnuri (2014) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2013)*. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.